

KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN INGGRIS DALAM PEMBANGUNAN KAPAL BERJENIS FRIGATA

Wahyu Ansari¹

Abstract: *Indonesia is a country that has a very strategic geographical area and location. This makes Indonesia must have many warships to secure its sea territory. However, Indonesia is actually conducting defense cooperation with the UK in the construction of frigate ships, which are only 2 units. This cooperation raises many questions, especially what Indonesia's interests are derived from this cooperation with the UK. The focus of this research is to analyze what interests are brought by Indonesia in the frigate shipbuilding cooperation with the UK. The research method uses qualitative research methods and uses secondary data as the main data and uses document study analysis techniques as data validity techniques. To be able to analyze Indonesia's interests, researchers use the concept of national interest by Donald E Nuechterlain which divides national interests into 4 dimensions of interest, namely Defense, Economy, Regional order, and Ideology. From the results of the analysis, the researcher concluded that Defense interests and Economic Interests are the interests carried by Indonesia in the cooperation in the construction of this frigate. The first interest is defense and security. The Indonesian government sees that with the cooperation in building frigates with the UK this can be a way or an effort to fulfill Indonesia's defense and security interests with the aim of increasing its defense capability so that it can cover the ALKI area as well as Indonesia's vast sea area. second economic interests. The cooperation between Indonesia and the United Kingdom in the construction of this frigate is one of the efforts of the Indonesian government to be able to secure its sea area so that the economic potential of Indonesian waters can be maximized so as to be able to increase the country's foreign exchange.*

Keywords: *Indonesia National Interest, Frigate, Donald E. Nuechterlain National interest concept.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah, dan letak geografis yang sangat strategis. Luas wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km² sebagian besar didominasi oleh perairan seluas 3,25 juta km² (Pratama, 2020). Secara geografis Indonesia berada diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi yang strategis ini membuat Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang sangat ramai dilalui oleh kapal kapal asing.

ALKI adalah alur laut yang ditetapkan berdasarkan konvensi hukum laut internasional sebagai alur perlintasan yang dapat dilalui kapal-kapal asing untuk perlintasan internasional. Indonesia membagi alur laut kepulauannya menjadi tiga koridor, yaitu; ALKI I, II, dan III (Hutagalung, 2017). Dengan ditetapkannya jalur ALKI, membuat Indonesia menjadi terbuka karena perairan harus terjamin keamanannya dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Ancaman dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari negara tertentu maupun dari aktor non-negara, dengan intensitas ancaman yang beragam pula.

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: Wahyuansari123@gmail.com.

Ancaman tersebut seperti pelanggaran wilayah yang berupa perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal, dan penyelundupan manusia (Adriansyah, 2020).

Selain itu, tentunya sulit bagi TNI Angkatan Laut untuk melakukan operasi militer atau patroli terhadap wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan, kapal-kapal TNI AL yang jangkauannya terbatas karena luasnya perairan teritorial dan ruang perairan yang memiliki banyak teluk dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kapal multiguna yang cepat, lincah bermanuver, dan memiliki basis radar yang luas untuk mengoptimalkan patroli di perairan Indonesia.

Realitas kehadiran berbagai jenis ancaman dan alutsista TNI masih terbatas. Indonesia harus merespons dengan kemampuan dan kekuatan keamanan maritim yang memadai untuk memitigasi berbagai ancaman tersebut. Kapal jenis frigata dianggap cocok untuk mencakup spektrum yang luas di daerah perairan Indonesia, yang tidak dapat dilakukan dengan jenis kapal lainnya. Hal ini dikarenakan kapal berjenis frigata merupakan kapal multi fungsi yang memiliki kecepatan yang tinggi, mampu bermanuver dengan lincah, jangkauan radar yang luas, serta ukuran yang lebih besar membuat kapal berjenis frigata dapat berlayar dalam waktu yang lama.

Berdasarkan data dari Global Fire Power tahun 2020, diketahui bahwa dengan wilayah laut seluas 3.257.357 km² Indonesia hanya memiliki 7 Frigata dan 5 diantaranya termasuk kapal frigata tua yang akan dipensiunkan secara bertahap (Zahara & Arjun Rizky, 2020). Jumlah tersebut masih dibawah target minimal kapal frigata yang harus dimiliki Indonesia, yakni 15 kapal frigata (Wirasuta, 2020). Maka dari itu, Pemerintah Indonesia sedang gencar membeli serta melakukan kerjasama dengan negara lain salah satunya dengan Inggris dalam pembangunan kapal berjenis frigata.

Kerja Sama pertahanan antara Indonesia dan Inggris dalam pembangunan kapal berjenis frigata resmi terjalin pada 16 September 2021 di London, melalui Perusahaan industri pertahanan dari kedua negara yakni PT. PAL Indonesia (*persero*) dengan Rosyth Royal Dockyard Ltd (*Babcock*) yang menandatangani perjanjian pembelian Lisensi dari kapal berjenis frigata yang bernama Arrowhead 140, serta disaksikan secara langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Inggris Rt Hon Ben Wallace (Kemhan Indonesia, 2021)

Kapal Arrowhead 140 ini akan dibangun dua unit yang akan memakan waktu 69 bulan (PAL, 2021). Spesifikasi Kapal Arrowhead 140 tersebut antara lain; memiliki panjang sekitar 144 meter, lebar 19,75 m, dan memiliki bobot 5700 ton. Kapal Arrowhead 140 ini dilengkapi dengan mesin utama yang memiliki spesifikasi 4 x 9100 kW yang mampu memacu kapal dengan kecepatan maksimum hingga 28 knot (PT.PAL, 2021). Kapal Arrowhead 140 ini memiliki alat dengan sistem tempur yang canggih, antara lain;

1. Sistem rudal dan sistem persenjataan untuk peperangan udara dan peperangan permukaan dan peperangan bawah air
2. Radar Udara Jarak Menengah
3. Sistem manuver *Bow thruster*
4. Sistem manajemen tempur *TACTICOS*
5. Hangar untuk Helicopter ukuran medium (PT.PAL, 2021).

Gambar 1 Kapal Arrowhead 140



Sumber : Arrowhead.com

Jumlahnya pengadaannya yang hanya dua unit masih berada dibawah target minimum 15 kapal frigata yang harus dimiliki Indonesia untuk mengamankan wilayah maritim Sehingga menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dikaji mengenai apa kepentingan yang mendasari Indonesia bekerjasama dengan Inggris dalam pembangunan kapal berjenis frigata.

Kerangka Teori

Konsep Kepentingan Nasional

Analisis kepentingan nasional suatu negara tidak lepas dari pengaruh internal dan eksternal negara tersebut. Setiap kepentingan nasional dibentuk atas dasar kebutuhan, keinginan dan cita-cita yang harus dicapai negara melalui setiap politik luar negeri.

Donald E. Nuechterlain menjelaskan bahwa kepentingan Nasional merupakan sebuah kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain yang termasuk lingkungan eksternalnya. Selanjutnya, Nuechterlein juga menjelaskan tiga poin dasar yang perlu diperhatikan dalam kepentingan nasional, yaitu:

1. Kebutuhan negara yang harus diperhatikan dalam menentukan kepentingan negara berbeda dengan proses politik. Konteks politik dalam hal ini mencakup perspektif kepala negara atau figur eksekutif. Pandangan atau kebijakan pemimpin mungkin berbeda dengan kepentingan umum negara, tetapi tetap merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan.
2. Kepentingan nasional merupakan ciri negara berdaulat dan tidak dapat dianalisis dalam kasus organisasi internasional atau negara jajahan. Karena kepentingan nasional suatu negara tidak terlepas dari penggunaan kekuatan, pembatasan perdagangan dan pembentukan aliansi, yang tentunya hanya dapat dilakukan oleh negara yang berdaulat penuh.
3. Dalam menganalisis kepentingan nasional perlu diperhatikan perbedaan pokok yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang sering juga disebut kepentingan umum.

Donald E. Nuechterlain juga mengemukakan bahwa ada 4 elemen dasar dalam kepentingan Nasional, yaitu kepentingan pertahanan dan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata regional, dan kepentingan ideology (Nuechterlain, 1979).

1. Kepentingan pertahanan dan keamanan
Kepentingan Pertahanan berfokus pada upaya perlindungan wilayah suatu negara dan warga negaranya terhadap ancaman secara langsung dan ancaman tidak langsung.
2. Kepentingan Ekonomi
Kepentingan Ekonomi yaitu adanya upaya untuk menambahkan nilai ekonomi suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain.
3. Kepentingan tata regional
Kepentingan tata regional berkaitan pada upaya menjaga stabilitas politik maupun ekonomi dengan negara tujuan agar warga negaranya dapat beraktivitas dengan baik di luar batas negara dengan aman.
4. Kepentingan Ideologi
Kepentingan Ideologi berfokus pada upaya negara dalam meningkatkan perlindungan terhadap nilai-nilai yang dianggap penting dan diyakini oleh segenap bangsanya dalam berinteraksi dengan negara lain.

Selain itu, dalam menganalisis kepentingan nasional perlu digarisbawahi bahwa intensitas ketertarikan bergantung pada berbagai faktor, antara lain, misalnya pertimbangan strategis, karakteristik demografis, dinamika hubungan dengan entitas internasional lainnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai 4 elemen dasar dalam teori Kepentingan Nasional Donald E Nuechterlain yang digunakan penulis untuk menganalisis Kepentingan Indonesia bekerjasama dengan Inggris dalam pembangunan kapal berjenis frigata. Penulis mengetahui jika ada Indikasi kuat alasan Indonesia memilih Inggris ini terkait dengan 4 elemen dasar dalam Teori tersebut yakni Kepentingan Pertahanan dan keamanan dan Kepentingan Ekonomi.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka atau *Library Research*. Dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Perairan Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah, dan letak geografis yang sangat strategis. Luas wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km² sebagian besar didominasi oleh perairan seluas 3,25 juta km² (Pratama, 2020). Secara geografis Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera yaitu benua Australia dan benua Asia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi yang strategis ini membuat Indonesia memiliki alur laut kepulauan yang sangat ramai dilalui oleh kapal kapal asing.

Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu jalur pelayaran dan pesawat udara yang dapat digunakan kapal atau pesawat udara asing untuk navigasi dan penerbangan damai seperti biasa di atas laut. Indonesia membagi alur laut kepulauannya menjadi tiga koridor, yaitu; ALKI I, II, dan III (Hutagalung, 2017). ALKI menjadi jalur pelayaran bagi perekonomian

dunia dan dengan ditetapkannya jalur ALKI, membuat Indonesia menjadi terbuka dan rentan karena perairan harus terjamin keamanannya dari segala bentuk gangguan dan ancaman terhadap kapal Indonesia serta kapal-kapal dagang dan kapal bermuatan ekonomis lainnya. Ancaman dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari negara tertentu maupun dari aktor non-negara, dengan intensitas ancaman yang bervariasi. Ancaman tersebut seperti pelanggaran wilayah yang berupa perompakan bersenjata, kecelakaan, penangkapan ikan secara ilegal, dan penyelundupan manusia (Adriansyah, 2020).

Table 1 Ancaman di Wilayah Laut Indonesia tahun 2018-2020

No	Ancaman	Kasus
1	Pencurian Ikan	312
2	Penyelundupan Manusia	90
3	Perompakan	87

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2018 s/d 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil menangkap 312 kapal ikan yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di ALKI, seperti Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi (Suherman, et. al, 2020)

Mayoritas pelaku pencurian ikan secara ilegal adalah kapal ikan asing yang berasal dari Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia yang melakukan pencurian ikan secara ilegal. Intensitas pencurian ikan secara ilegal ini menunjukkan bahwa pencurian ikan masih marak terjadi di ZEE Indonesia terlebih data tersebut hanya memperhitungkan berdasarkan jumlah kapal ilegal yang tertangkap bukan berdasarkan banyaknya kapal sesungguhnya (Nurhakim, 2020).

Berdasarkan data BNP2TKI disebutkan pada kurun waktu 2018 sd/ 2020 telah terjadi 90 kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Para korban perdagangan manusia ini berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dan dikirim ke sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara di Timur Tengah (AS, 2020).

Kasus perompakan di Indonesia, pada kurun waktu 2018 s/d 2020 terjadi 87 kasus perompakan yang terjadi di sejumlah ALKI Indonesia seperti; Selat Malaka, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Singapura, dan Laut Jawa (ICC, 2020). Ancaman perompakan di perairan Indonesia ini, secara tidak langsung akan mengancam nyawa dari para pelaut, baik itu pelaut asing ataupun pelaut Indonesia. Selain itu, kasus perompakan ini dapat mengakibatkan lumpuhnya perdagangan global karena mengganggu arus distribusi barang antar negara (Supriyono, 2019).

Ancaman selanjutnya adalah adanya Sengketa Laut Tiongkok Selatan yang muncul akibat klaim Tiongkok berdasarkan sejarah atas 90 persen wilayah LTS berupa apa yang disebut garis putus-putus yang membentang dari daratan Tiongkok dan hingga beberapa ratus kilometer dari daerah Filipina, Malaysia dan Vietnam. Permasalahan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan permasalahan yang kompleks, antara lain sengketa wilayah dan sengketa perbatasan laut, yang hingga saat ini belum terselesaikan. tumpang tindih klaim antara negara-negara yang bersengketa ini menimbulkan ketegangan antara negara anggota ASEAN yang bersengketa (kemenkumham, 2018)

Gambar 2 Negara-Negara yang bersengketa di laut Tiongkok Selatan



Sumber: Pessek.W, 2017

Sejak tahun 2010 Konflik LTS ini juga mulai menyeret Indonesia, hal ini dikarenakan Tiongkok mengklaim secara sepihak wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang mana merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan argumen tradisional fishing zone mereka (Kemenkumham, 2018).

Gambar 3 Peta Laut Natuna Utara



Sumber: Ziyadi. A, 2020

Klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna Utara membuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok menjadi buruk pada tahun 2013, yang memuncak pada tahun 2016. Pada tahun 2016, beberapa kapal penangkap ikan Tiongkok ditemukan telah memasuki ZEE Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal yang tidak dilaporkan. Insiden serupa kembali terjadi pada 2019 dan 2020, kali ini melibatkan kapal penangkap ikan serta Penjaga Pantai Tiongkok untuk pelanggaran serupa (Yahya, 2020).

Selain Tiongkok dan negara-negara ASEAN, kompleksitas masalah LTS bahkan telah negara besar seperti Amerika Serikat (AS) untuk turut hadir di LTS melalui kekuatan militernya dengan meningkatkan frekuensi aktivitas *Freedom of Navigation Operation* (FONOPS) untuk menentang ekspansi Tiongkok di kawasan tersebut (Hutama, 2019).

Melihat segala macam ancaman yang ada, tentu hal tersebut dapat mengganggu kedaulatan dan keamanan negara Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pertahanan negara yang kuat agar dapat menangkal segala jenis ancaman yang ada.

Kepentingan Indonesia bekerjasama dengan Inggris dalam pembangunan kapal berjenis frigata

a. Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Menurut Nüchterlein, kepentingan pertahanan dan keamanan adalah pengambilan kebijakan berdasarkan kepentingan suatu negara dalam melindungi warganya dan negaranya dari segala jenis ancaman. Dalam kasus Indonesia sendiri, salah satu pilar kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi tanah air dan kehidupan warga negara Indonesia. Berdasarkan hal penting ini, Indonesia harus membangun kerja sama dan hubungan baik dengan negara lain.

Berbicara atas nama pertahanan dan keamanan negara, Nüchterlein menyatakan bahwa salah satu faktor terpenting yang dipertimbangkan Indonesia ketika menentukan kepentingan kebijakan luar negeri suatu isu dan dampaknya terhadap kepentingan nasional adalah di mana ancaman itu terjadi. Faktor geografis Indonesia yang sangat strategis ini memunculkan beberapa masalah serius dan dari permasalahan tersebut berpengaruh terhadap wilayah Indonesia dan warga negaranya. Dalam konteks ini, dianggap bahwa ketahanan nasional tergantung pada seberapa jauh letak permasalahannya dari wilayah Indonesia.

Indonesia tengah menghadapi ancaman keamanan berupa pencurian ikan secara ilegal, perampokan bersenjata, serta penyelundupan manusia yang masing-masing terjadi di ALKI Indonesia yang merupakan jalur pelayaran bagi kapal atau pesawat udara asing yang bermuatan ekonomis.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi ancaman pertahanan berupa adanya kemungkinan invasi dari Tiongkok yang mana dalam hal ini telah mengklaim laut Natuna Utara berdasarkan tradisional fishing zone Tiongkok.

Jika melihat dari ancaman yang ada tentu hal ini akan menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia perlu memodernisasi Alutsista agar dapat menjaga kedaulatan wilayah perairannya, Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang kuat dan memiliki daya tangkal tinggi.

Akan tetapi, sebagai negara yang memiliki wilayah perairan yang luas Indonesia dinilai masih lemah dan kurang dalam menjaga wilayah perairannya apalagi jika menghadapi kondisi terburuk berupa perang. Saat ini TNI Angkatan Laut hanya memiliki tujuh frigata yang diandalkan sebagai kekuatan utama (Zahara & Arjun Rizky, 2020). Jumlah tersebut masih dibawah target MEF kapal Frigata yang harus dimiliki Indonesia yaitu sebanyak 15 Kapal Frigata. Terlebih lagi lima dari tujuh kapal frigata tersebut berusia 40 tahun.

Kondisi alutsista TNI yang saat ini rata-rata berumur 40 tahun berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional alutsista TNI dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Kondisi TNI baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana termasuk alutsista masih jauh dalam kata ideal berdasarkan postur pertahanan negara *Minimum Essential Force* (MEF) Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus memiliki strategi untuk meningkatkan sistem pertahanannya salah satunya dengan bekerjasama dengan negara lain.

Indonesia akhirnya memilih kapal frigata dari Inggris dalam upaya pengadaan kapal frigata yang bernama Arrowhead 140. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat

bahwa Kerjasama antara Indonesia dan Inggris dalam pembangunan kapal frigata ini berkaitan dengan kepentingan pertahan dan keamanan Indonesia untuk mengamankan alur laut kepulauannya. Bagi Indonesia ALKI merupakan jalur yang sangat penting untuk melakukan aktivitas ekonomi Indonesia maupun aktivitas ekonomi dunia dan kelangsungan hidup. Indonesia melihat bahwa dengan kerjasama pembangunan kapal frigata dengan Inggris ini dapat menjadi jalan atau upaya untuk pemenuhan kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia dengan tujuan meningkatkan kapabilitas pertahanannya agar dapat meng-cover wilayah ALKI serta wilayah laut indonesia yang sangat luas.

Bagi Indonesia kapal Arrowhead 140 ini merupakan pilihan yang sangat cocok dan cukup bagi Indonesia untuk menangani masalah ancaman di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan kapal Arrowhead 140 bagi angkatan laut Inggris dibangun atas dasar pengawalan dan pengamanan wilayah laut Inggris yang menjadi jalur transportasi dan perdagangan antara benua Eropa dan benua Amerika. Sama halnya dengan Indonesia yang menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan benua Asia, benua Australia, serta dapat dilalui juga oleh kapal yang ingin ke benua Eropa dan benua Amerika. Selain itu kondisi geografis dari Indonesia dan Inggris ini sama-sama negara kepulauan.

Kapal Arrowhead 140 ini sesuai dengan kriteria dari pengadaan Alutsista Indonesia berdasarkan MEF yaitu kekuatan daya tembak dan manuver. Arrowhead 140 memiliki Sistem peluru kendali dan sistem senjata untuk perang udara dan perang anti permukaan jarak jauh, dan anti kapal selam. Selain itu, kapal ini juga memiliki Sistem manuver Bow thruster. Bow thruster adalah sebuah sitem manuver pada kapal yang dipasang pada haluan dari sebuah kapal atau perahu untuk membuatnya lebih stabil ketika mendapat dorongan dari arus laut. Dengan panjang kapal 140 m dan lebar 19 m untuk masalah daya gerak atau manuver Kapal Arrowhead 140 ini tentu bukan masalah bagi kapal ini dan sangat cocok dengan demografis wilayah laut Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau.

Telebih Kapal Arrowhead 140 ini memiliki jangkauan sejauh 17.000 km dibandingkan kapal lain yang ditawarkan ke Indonesia seperti Kapal Omega yang hanya 8.000 km. Jika untuk Kapal Omega, kapal ini memiliki jangkauan sejauh 18.000 km tapi kapal ini tidak memiliki teknologi seperti bow thruster sehingga untuk masalah manuver Kapal Arrowhead lebih unggul. Apalagi, Kapal Arrowhead 140 ini dibangun atas dasar prioritas pengawalan dan pengamanan wilayah lautan Indonesia (keris, 2022). Sehingga Kapal Arrowhead ini tentu menjadi pilihan yang baik untuk melindungi Alur Laut Kepulauan Indonesia indonesia.

Selain itu, kerjasama dengan Inggris dalam pembangunan kapal frigata ini juga menjadi salah satu cara bagi Indonesia untuk mempererat kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Inggris. mengingat Inggris merupakan negara yang kuat dalam hal militer serta maju dalam hal teknologi khususnya Industri pertahanannya.

b. Kepentingan ekonomi

Menurut Nuechterlein, kepentingan ekonomi merupakan pengambilan sebuah kebijakan yang didasarkan pada kepentingan negara untuk meningkatkan neraca perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga dan negaranya. Kelangsungan hidup ekonomi Indonesia tentu memiliki nilai vital dalam kepentingan nasional Indonesia. Dalam menentukan level kepentingan negara terhadap negara asing, Indonesia tentu harus melihat kekuatan serta potensi suatu negara untuk mengukur bagaimana intensitas tersebut terhadap kepentingan Indonesia.

Kerjasama antara Indonesia dan Inggris dalam pembangunan kapal frigata ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi Indonesia karena Indonesia menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan benua Asia dan benua Australia serta diantara samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Bagi Indonesia ALKI merupakan jalur yang sangat penting untuk melakukan aktivitas ekonomi Indonesia maupun aktivitas ekonomi dunia dan kelangsungan hidup. Hal ini dikarenakan sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari perdagangan tersebut melewati Indonesia (Kemenhub, 2018).

Maka daripada itu Indonesia berpotensi sebagai pintu gerbang dan pusat aktivitas ekonomi maritim serta penyangga maritim di kawasan. Hal ini merupakan kesempatan Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia dan mampu meningkatkan devisa negara karena letak strategis ini menyebabkan Indonesia mudah berdagang dengan negara lain. Hasil produksi Indonesia mudah dipasarkan dan Indonesia juga mudah melakukan import barang dari berbagai Negara lain (Darmawanti, 2020).

Namun disisi lain wilayah laut Indonesia masih terdapat ancaman yang dapat mengganggu aktivitas perdagangan tersebut seperti adanya perompakan bersenjata yang menyerang kapal-kapal bermuatan ekonomis di wilayah ALKI Indonesia. Ancaman perompakan di perairan Indonesia ini secara tidak langsung akan mengganggu arus distribusi barang antar negara sehingga mengakibatkan lumpuhnya perdagangan global. Selain itu dengan adanya ancaman ini akan merugikan Indonesia, karena kapal-kapal yang ingin melalui laut Indonesia lebih memilih jalur lain yang lebih aman untuk dilalui.

Selain itu, ada juga ancaman pencurian ikan yang merugikan Indonesia. Lokasi Indonesia yang diapit oleh dua samudra yaitu Hindia dan pasifik membuat Indonesia memiliki potensi hasil laut yang besar. Potensi kelautan Indonesia dalam setahun mencapai 149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun (Muhammad, 2012).

Pencurian ikan ini membuat Indonesia kehilangan pendapatan negara yang mencapai Rp 30 triliun per tahun dan juga hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang harus ditangkap oleh nelayan Indonesia, malah dicuri oleh nelayan asing (Muhammad, 2012).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melihat bahwa Kerjasama antara Indonesia dan Inggris dalam pembangunan kapal frigata ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia agar dapat mengamankan wilayah lautnya sehingga potensi ekonomi dari perairan Indonesia dapat dimaksimalkan.

Selain itu, salah satu kepentingan ekonomi yang ingin dicapai Indonesia dengan bekerjasama dengan Inggris adalah untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya. Karena dalam kerjasama dengan Inggris ini, Indonesia mendapat *Transfer of Technology* (ToT) untuk pembuatan kapal. Sehingga dengan adanya ToT yang diadopsi oleh Indonesia, maka industri galangan kapal dalam negeri selangkah lebih maju dalam penguasaan teknologi khususnya teknologi pembuatan kapal frigata. Penguasaan teknologi ini memungkinkan Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan pertahanan pasar dalam negeri, bersaing secara internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dikemudian hari.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan, maka dapat kesimpulan bahwa terdapat dua kepentingan yang mendasari Indonesia bekerjasama dengan Inggris dalam pembangunan kapal berjenis frigata ini. Kepentingan yang pertama adalah kepentingan pertahanan dan keamanan. Pemerintah Indonesia melihat bahwa perlu adanya

penambahan alutsista untuk mengamankan Alur laut kepulauannya. Bagi Indonesia ALKI merupakan jalur yang sangat penting untuk melakukan aktivitas ekonomi Indonesia maupun aktivitas ekonomi dunia dan kelangsungan hidup. Indonesia melihat bahwa dengan kerjasama pembangunan kapal frigata dengan Inggris ini dapat menjadi jalan atau upaya untuk pemenuhan kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia dengan tujuan meningkatkan kapabilitas pertahanannya agar dapat meng-cover wilayah ALKI serta wilayah laut Indonesia yang sangat luas.

Selain itu, Indonesia melihat bahwa kapal buatan Inggris ini cocok untuk melindungi wilayah laut Indonesia yang masih terdapat ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Karena kapal ini dibangun dengan tujuan untuk menjaga wilayah laut Inggris dari ancaman kamanan dan agresi dari negara lain. selain itu terdapat kesamaan antara Indonesia dan Inggris yang mana sama-sama negara kepulauan.

Sementara itu, kepentingan yang kedua adalah kepentingan ekonomi. Kerjasama antara Indonesia dan Inggris dalam pembangunan kapal frigata ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia agar dapat mengamankan wilayah lautnya sehingga potensi ekonomi dari perairan Indonesia dapat dimaksimalkan. Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hal Ini merupakan kesempatan Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia dan mampu meningkatkan devisa negara karena letak strategis ini menyebabkan Indonesia mudah berdagang dengan negara lain. Kemudian pengamanan wilayah laut ini juga dapat memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia melalui sektor perikanan yang mana beberapa tahun terakhir masih terdapat ancaman pencurian ikan oleh negara asing.

Selanjutnya, kepentingan ekonomi Indonesia bekerjasama dengan Inggris dalam pembangunan kapal berjenis frigata ini terkait dengan keinginan pemerintah Indonesia adalah mewujudkan industri pertahanan yang mandiri. Adanya ToT yang didapatkan oleh Indonesia membuat industri galangan kapal Indonesia selangkah lebih maju dalam hal penguasaan teknologi pembuatan kapal frigata. Penguasaan teknologi ini memungkinkan Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan pertahanan pasar dalam negeri, bersaing secara internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, A. (2020). *Bakamla Ungkap Sejumlah Ancaman Keamanan Laut Indonesia*. [daring]. Voa Indonesia. Tersedia di: <https://www.voaindonesia.com/a/bakamla-ungkap-sejumlah-ancaman-keamanan-laut-indonesia/5450902.html>
- AS. (2020). *Laporan Perdagangan Orang 2020* [daring]. Tersedia di: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>
- Darmawanti P. (2020). *Dampak positif dan negatif letak strategis Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia* [daring]. Tersedia di: <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/dampak-positif-dan-negatif-letak-strategis-indonesia-sebagai-jalur-perdagangan-dunia/#:~:text=Letak strategis menyebabkan Indonesia mudah,barang dari berbagai Negara lain.>

- Hutagalung, S.M. (2017). *Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman bagi keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia*. Journal of International Relation Study. Vol 1
- Hutama, M. (2019). *Intervensi Negara Ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan (LCS)*. Jurnal Dinamika Global. Volume 4
- ICC IMB. (2020). *Piracy and Armed Robbery Against Ships* [daring]. Tersedia di: https://www.icc-ccs.org/reports/2020_Annual_Piracy_Report.pdf
- Kementrian Hukum dan HAM. (2018). *SENGKETA WILAYAH MARITIM DI LAUT TIONGKOK SELATAN (Maritime Territorial Dispute in South China Sea)*. Jurnal Hukum. Vol 18. No 740. Hal 219-240.
- Kementrian Pertahanan Indonesia (2021) *Menhan RI Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan Kontrak Kapal Frigata TNI AL Type 31 antara PT PAL dan Babcock Internasional pada pameran DSEI di Inggris* [daring]. Tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/2021/09/17/menhan-ri-prabowo-subianto-menghadiri-penanda-tanganan-kontrak-kapal-frigat-tni-al-type-31-antara-pt-pal-dan-babcock-internasional-pada-pameran-dsei-di-inggris.html>
- Kemenhub. (2018). *Empat Puluh Persen Jalur Perdagangan Dunia Melewati Indonesia* [daring]. Tersedia di: <https://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-perdagangan-dunia-melewati-indonesia>
- Keris. (2022). *Urgensi Modernisasi TNI-AL, Apakah Armada Kita Siap Jika Diserang Hari Ini?* [daring]. Tersedia di: <https://lembagakeris.net/urgensi-modernisasi-tni-al-apakah-armada-kita-siap-jika-diserang-hari-ini/>
- Muhammad, S. (2012). *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Billateral di Kawasan*. Jurnal Politica. Vol 3. No 1. Hal 59-86.
- Nuechterlain, Donald E. (1979). *The Concept of National Interest: A Time for New Approaches*. Orbis: A Journal of World Affairs (Vol.23, No.1, Spring)
- Nurhakim, R (2021). *Menakar Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)*. Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Pessek, W. (2017). *Making Sense Of The South China Sea Dispute* [daring]. Tersedia di: <https://www.forbes.com/sites/outofasia/2017/08/22/making-sense-of-the-south-china-sea-dispute/?sh=7f55fe921c3b>
- Pratama, O. (2020). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. [daring]. Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut. Tersedia di: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> (diakses pada 9 Juni 2022)

-
- PT. PAL. (2021). *Inilah Spesifikasi Frigat Pesanan Kemhan RI* [daring]. Tersedia di: <https://www.pal.co.id/2021/09/publikasi/news-berita/inilah-spesifikasi-frigat-pesanan-kemhan-ri/>
- PT. PAL. (2021). *Resmi, PAL Pilih Desain Babcock Untuk Proyek Kapal Frigate Kemhan* [daring]. Tersedia di: <https://pal.co.id/2021/09/publikasi/news-berita/resmi-pal-pilih-desain-babcock-untuk-proyek-kapal-frigate-kemhan/>
- Suherman, Sentosa, Ihsan, Juwana. (2020). *The eradication of IUU fishing in Indonesia for fisheries resources sustainability by the Task Force 115*. Vol 13. No 5. Jurnal ACL Bioflux. Tersedia di: <http://www.bioflux.com.ro/docs/2020.2522-2537.pdf>
- Supriyono (2019) *Strategi Pertahanan Laut dalam menghadapi ancaman perompakan sebagai ancaman maritim di wilayah perairan Republik Indonesia*. Jurnal Prodi strategi pertahanan laut. Vol. 5
- Wirasuta. (2020). *Perencanaan pembangunan kekuatan maritim Indonesia untuk menghadapi tantangan tahun 2020*. Jurnal Pertahanan. Vol, 3.
- Yahya, A. (2020). *Saat Bakamla dan Coast Guard China bersitegang di Laut China Utara* [daring]. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/15/06205561/saat-bakamla-dan-coast-guard-china-bersitegang-di-laut-natuna-utara>
- Zahara, E & Arjun, R. (2020). *Analisis Ringkas Cepat Anggaran Pertahanan Indonesia*. Jurnal Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI. Vol No. 04/arc. Hal 1-6
- Ziyadi, A. (2020). *Menlu China: Terima Atau Tidak, Laut Natuna Utara Hak Kami* [daring]. Tersedia di: <https://militermeter.com/menlu-china-terima-atau-tidak-laut-natuna-utara-hak-kami/>